



Anggaran untuk Code masih digodok

Oleh Anggraenny Prajayanti & Rina Wijayanti
HARIAN JOGJA

JOGJA: Pencairan dana tak terduga untuk tanggap darurat Code masih menunggu te-laah Kimpraswil Kota Jogja. Anggaran yang diajukan harus dipastikan benar-benar mendesak sehingga tidak menyalahi ketentuan.

“Saat ini masih dilihat oleh Kimpraswil apakah yang diajukan itu benar-benar mendesak atau tidak. Kalau tidak tentu tidak boleh pakai anggaran tidak terduga karena ada pertanggungjawabannya,” kata Walikota Jogja, Herry Zudianto saat ditemui di Balaikota, Selasa (10/5).

Herry mengatakan yang masih diperbolehkan menggunakan anggaran tidak terduga di antaranya mengancam keselamatan jiwa termasuk untuk logistik dan beronjong yang mendesak.

Penggunaan anggaran tidak terduga yang tidak perlu melalui proses lelang dan sebagainya membuat Walikota perlu berhati-hati dalam mengeluarkan SK penggunaan anggaran ini. Jika tidak mengancam dan masih dalam kategori normal atau masuk dalam kategori *recovery*, anggaran bisa diambilkan dari APBD. Untuk *recovery*, selain dari APBD Kota Jogja, juga bisa mengajukan *sharing* dengan Provinsi DIY.

Walikota menambahkan, status tanggap darurat Code

”

Saat ini masih dilihat oleh Kimpraswil apakah yang diajukan itu benar-benar mendesak atau tidak. Kalau tidak tentu tidak boleh pakai anggaran tidak terduga karena ada pertanggungjawabannya

Herry Zudianto
Walikota Jogja

Walikota menambahkan, status tanggap darurat Code

Walikota Yogyakarta sekretaris Daerah

masih akan diperpanjang hingga akhir Mei ini.

Adapun, Kabid Anggaran Dinas Pendapatan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Jogja, Kadri Renggono mengatakan permintaan anggaran dari dana tidak terduga memang masih belum turun.

Sebenarnya, proses pencairan anggaran tidak membutuhkan waktu lama. Bahkan bisa hanya sekitar tiga hari jika sudah dibahas di BKPBD karena tinggal menunggu SK Walikota dan pemberitahuan ke DPR. Dana tidak terduga sendiri sampai saat ini masih cukup banyak tersisa, bahkan masih di atas Rp7 miliar dari total Rp8 miliar.

Terpisah, Kepala Dinas PU dan ESDM Provinsi DIY Rani Sjamsinansi mengatakan penataan bantaran Code rumit. Dijelaskannya rencana pe-

nataan kawasan bantaran Code tersebut merupakan sebuah upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bersifat jangka panjang akibat aliran lahar dingin di wilayah Kota Jogja.

Dalam penataannya dikatakan Rani, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian secara mendalam. “Pengkajian secara mendalam ada pada meja Dinas PU dan ESDM Provinsi dan saat ini belum selesai kami bahas. Perlu dipahami juga penataan kawasan yang ada di tengah kota memang memiliki kesulitan yang berbeda,” jelas Rani.

Rani menjelaskan penataan kawasan Code dilakukan oleh pemerintah secara terpadu tidak secara terpotong-potong. Kerumitan penataan Code ialah seputar pemahaman tata kota dan kesesuaiannya dengan perkembangan kota itu sendiri.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. Kantor Penanggulangan Kebakara			

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005